

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah bukan lagi permasalahan baru di masyarakat, melainkan telah menjadi isu global yang mengakar sejak lama. Berdasarkan data dari World Bank 2018, produksi sampah dunia dapat mencapai 3,4 miliar ton per tahun pada 2050 apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan (Kaza et al., 2018). Pengelolaan sampah menjadi tantangan global yang kompleks akibat pesatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk beserta aktivitas antropogeniknya, tingginya tingkat konsumsi, serta terbatasnya infrastruktur pengelolaan yang memadai (Rahmah et al., 2024).

Tantangan pengelolaan sampah juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kab. Bone. Pada tahun 2025, Kab. Bone menghasilkan timbulan sampah terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dengan jumlah timbulan sampah sebesar 150.995,39 ton per tahun dengan presentasi sampah terkelola 14,74% Angka ini menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu tercatat timbulan sampah sebesar 149.743,08 ton per tahun dengan presentasi sampah terkelola 72,55% (KLHK, 2025). Dengan kata lain pada tahun 2025 85,26% timbulan sampah Kab. Bone terbuang ke lingkungan.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juherah, Haidah, & Yunus (2025) bahwa pengelolaan sampah di Kab. Bone masih cenderung konvensional yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA Desa Passippo, Kec. Palakka, Kab. Bone. Kendati demikian, kapasitas fasilitas pengelolaan sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat dan perlu ditangani. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone, Dray Vibrianto menyatakan bahwa sampah yang perlu ditangani di TPA mengalami *overload* akibat peningkatan volume sampah yang masuk di TPA Desa Passippo yaitu sebelumnya rata-rata 70 ton per hari menjadi sekitar 200 ton per hari namun, pengelolaan sampah di TPA saat ini hanya mengandalkan satu unit eskavator untuk menyusun sampah (Tribun Bone, 2025). Selain kapasitas TPA yang *overload*, pengelolaan sampah yang tidak optimal ini juga menyebabkan kerugian di masyarakat terkhususnya yang bermukim di sekitar TPA Desa Passippo, masyarakat harus dihadapkan dengan bau busuk yang menyengat setiap hari beserta ancaman gangguan kesehatan.

Hal ini menandakan bahwa sampah yang berakhir di TPA merupakan solusi yang tidak efektif dalam menangani lonjakan jumlah sampah. Maka dari itu diperlukan paradigma baru dalam memandang sampah, sampah bukan lagi sekedar sisa dari aktivitas yang ditimbulkan manusia. Tetapi, menjadi sebuah sumber daya

yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dari hulu ke hilir (Auliani, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan sampah dengan metode pengelolaan sampah yang menggunakan pendekatan bermasyarakat dengan menitikberatkan bukan pada membuang sampah secara tepat tetapi, pada mengelola sampahnya (Rahmanita & Arieffiani, 2020).

Dalam merespon permasalahan tersebut, pemerintah Kab. Bone melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone telah mengembangkan alternatif pengelolaan sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah daerah, yaitu melalui program Bank Sampah Induk (BSI) Mabessa. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Dalam pelaksanaannya, program BSI menggunakan sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* atau dikenal juga sebagai kegiatan 3R merupakan segala aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, aktivitas penggunaan kembali sampah yang masih layak pakai atau dapat difungsikan, dan aktivitas mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Bank sampah sendiri merupakan sebuah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R juga dijelaskan sebagai sebuah konsep penanggulangan sampah dengan cara mengurangi (*Reduce*) barang atau material yang berpotensi menimbulkan sampah, menggunakan kembali (*Reuse*) barang-barang layak pakai yang masih bisa digunakan dan mendaur ulang (*Recycle*) mengolah barang-barang yang masih dapat didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat (Cunningham, 2004) dalam (Rahmanita & Arieffiani, 2020).

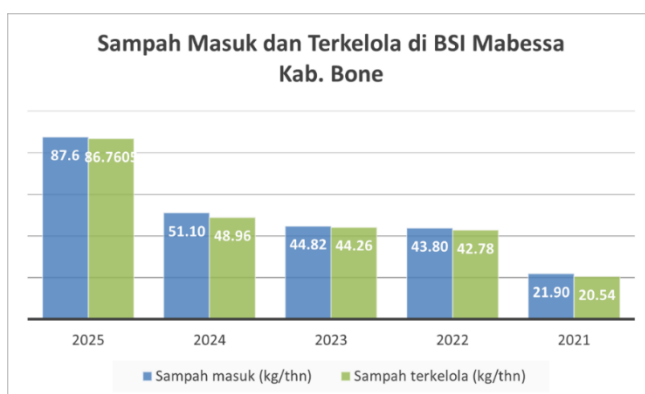
Hadirnya BSI merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta meminimalkan volume sampah yang berakhir di TPA. Melalui bank sampah, masyarakat akan berpartisipasi secara langsung dalam mengelola sampah apalagi mengingat sebagian besar sampah bersumber dari sampah rumah tangga. Selain itu, juga membantu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat (Auliani, 2020). Kepala DLH Kab. Bone mengungkapkan bahwa adanya bank sampah merupakan langkah solutif dalam mengatasi penanganan sampah yang selama 10 tahun ini tidak memberikan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan kurangnya keaktifan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah. Sehingga harapannya program bank sampah dengan pemberian insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah (DetikSulsel, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Juhaerah, et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan BSI Mabessa menerapkan prinsip 3R sebagai instrumen dalam mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA. Saat ini, jumlah penabung di BSI

Mabessa sebanyak 200 nasabah dengan 183 tercatat sebagai nasabah aktif. Dalam praktik *reduce* BSI Mabessa memberikan edukasi kepada nasabah untuk mengurangi pembelian barang yang menggunakan kemasan sekali pakai serta, mengimbau nasabah untuk menggunakan produk ramah lingkungan misalnya menggunakan kantong bekas sebagai wadah sampah guna mengurangi penggunaan plastik khusus sampah. Kemudian, prinsip *reuse* diterapkan dengan mengimbau penggunaan kembali barang-barang yang masih layak pakai ataupun mengolah barang bekas untuk digunakan kembali, misalnya penggunaan roda bekas sebagai pot tanaman hias di lingkungan BSI. Sementara itu, prinsip *recycle* diterapkan dengan memanfaatkan sampah yang dikumpulkan oleh penabung untuk didaur ulang melalui proses seperti pemilahan dan penggilingan sehingga menghasilkan produk seperti plastik daur ulang, kertas daur ulang hingga logam daur ulang. Misalnya saja di BSI, pihak bank sampah mengolah spanduk menjadi tas belanja yang dapat bernilai ekonomis.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada gambar 1.1 di bawah, total sampah masuk di Bank Sampah Induk Mabessa pada tahun 2025 sebanyak 87.6 kg/ tahun dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola yaitu 86.76 kg/ tahun. Jumlah ini meningkat cukup drastis jika dibandingkan pada tahun 2024 dengan jumlah sampah terkelola sebanyak 48.96 kg/ tahun. Grafik di bawah menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah sampah masuk dan terkelola di BSI Mabessa tiap tahunnya. Meski jumlah tersebut meningkat seiring meningkatnya pula jumlah timbulan sampah di Kab. Bone namun, angka ini mengindikasikan bahwa BSI berpotensi untuk berkontribusi dalam menurunkan jumlah sampah yang berakhir di TPA.

Gambar 1.1 Jumlah Sampah Masuk dan Terkelola di Bank Sampah Induk Mabesa Kab. Bone



Sumber: (SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024, diolah)

Adanya tren positif dalam manajemen sampah di BSI Mabessa menjadi suatu hal yang menarik, mengingat di berbagai daerah keberadaan bank sampah

yang berbasis kemitraan cenderung mengalami stagnansi. Seperti yang terjadi pada pengelolaan bank sampah di Kota Bekasi, penelitian yang dilakukan oleh Satibi., et al (2021) dengan judul *“Model Implementation of Community Based Waste Bank Management Policy in Bekasi City Through Mentality, Systems, And Networking Approach”* Penelitian ini menilai pengelolaan bank sampah dengan mengacu pada mentalitas, sistem, dan faktor jaringan kerja sama. Hasilnya menunjukkan pengelolaan yang belum efektif. Meskipun masing-masing aktor yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta menunjukkan komitmen yang kuat namun, kesadaran atas tanggung jawab masing-masing aktor masih kurang hal ini didorong oleh kurangnya komunikasi, transparansi dan konsistensi informasi. Serta adanya peraturan yang seringkali berubah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gimnastiar., et al (2023) dengan judul *“Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya)”* Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Morse & Stephens (2012) dan keberhasilan *Collaborative Governance* oleh Goldsmith & Donald (2009) dalam menilai pengelolaan sampah di Bank Sampah Indria Jaya, Semarang. Sebagai bank sampah pusat, Bank Sampah Indria Jaya belum sepenuhnya optimal dalam mengelola sampah, pada pelaksanaan kolaborasi masih terjadi perbedaan persepsi oleh masing-masing aktor terkait tujuan pengelolaan sampah. Serta, tidak ditemukannya kesepakatan atau komitmen tertulis oleh aktor sehingga beberapa aktor lepas tanggung jawab atas proses kolaborasi yang dijalankan. Selain itu, kegagalan kolaborasi juga disebabkan oleh tidak seimbangnya kedudukan aktor dalam pengelolaan bank sampah dan akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan aktor terhadap pemerintah.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, dapat dilihat bahwa belum optimalnya manajemen bank sampah tidak serta merta disebabkan oleh tidak adanya aktor atau program. Namun, diikuti oleh berbagai faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bank sampah. Berbeda dengan kondisi tersebut, temuan awal BSI Mabessa menunjukkan peningkatan keberhasilan pengelolaan sampah yang juga berbasis kemitraan dengan berbagai aktor. Maka dari itu, temuan ini menjadi menarik guna memahami bagaimana pengelolaan Bank Sampah Induk Mabessa.

Praktik BSI Mabessa tidak lepas dari partisipasi berbagai aktor yang bersinergi diantaranya masyarakat, swasta, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Dalam konteks organisasi publik, membangun jaringan dan hubungan kreatif merupakan hal penting guna memungkinkan terciptanya inovasi baru (Wronka & Wronka, 2018). Maka dari itu diperlukan mekanisme hubungan yang mampu mendukung pengelolaan sampah berjalan secara optimal. Salah satunya melalui inovasi sektor publik yaitu *Public Social Partnersip* (PSP) atau kemitraan publik sosial, penerapan model ini merupakan akibat dari meningkatnya kebutuhan pemerintah untuk mendorong peningkatan responsivitas layanan untuk publik.

Peningkatan layanan meliputi pemenuhan ekspektasi publik, pengelolaan anggaran, pemanfaatan perkembangan teknologi serta efisiensi pelayanan (Wronka & Wronka, 2018). Dengan semakin kompleksnya permasalahan publik, maka hadirnya PSP menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan kemitraan lintas aktor dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmudi (2007) bahwa pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan daerah sendiri, maka dari itu diperlukan kemitraan antara pemerintah daerah dengan berbagai aktor baik sektor swasta dan sektor ketiga untuk mendorong dan mengerakkan aktor dalam melakukan pembangunan daerah.

Kolaborasi merupakan pengaturan dimana terdapat satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non negara dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini bersifat formal dan didasarkan atas kesepakatan bersama melalui proses musyawarah yang bertujuan untuk menerapkan atau membuat kebijakan/ program (Ansell & Gash, 2008). Melalui kolaborasi membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mempelajari cara-cara alternatif dalam berperilaku dan melakukan sesuatu sehingga akan mendorong pengembangan budaya antar lembaga agar tercipta hasil yang saling menguntungkan (Shergold, 2008). Terjadinya kolaborasi merupakan buntut dari adanya hasil yang diinginkan bersama namun, tidak dapat tercapai apabila dilakukan secara terpisah. Sehingga diperlukan kegiatan kooperatif guna meningkatkan kapasitas diri sendiri dan orang lain agar tujuan bersama dapat tercapai (Emerson et al., 2012). Semakin berkembangnya zaman juga menuntut kecenderungan baru dalam tata kelola pemerintahan dengan penekanan pada *network* baik secara vertikal dan horizontal. Sehingga dalam mengatasi permasalahan publik pemerintah perlu menggunakan pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan kolaborasi antar jaringan-jaringan yang ada. Pendekatan ini menciptakan pengelolaan program yang fleksibel, desentralistis, dan inovatif (Matthoriq et al., 2021).

Maka, berdasarkan konsep tersebut pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengelola bank sampah melalui praktik kemitraan dengan berbagai *stakeholder*. Dalam mengelola sampah, BSI Mabessa bermitra dengan Surya Indah Swalayan. Surya Indah Swalayan bertanggungjawab dalam memfasilitasi penyediaan sembako berkualitas sehingga masyarakat yang menabung dapat memilih sampah yang ditabung diuangkan atau ditukar dengan kebutuhan pokok seperti sembako dan tabung gas. Selain itu, BSI Mabessa juga menjalin kemitraan dengan bank sampah unit yang tersebar di berbagai sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Watampone. Bank sampah unit berperan sebagai mitra pengepul sampah. Sekolah dan OPD bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan memilah sampah sebelum diberikan kepada BSI untuk diolah, adanya kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan bank sampah di Kab. Bone dapat berkelanjutan.

Kerjasama juga dijalin dengan PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIP3B) Sulawesi, PLN UIP3B memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yaitu berupa motor sampah, mesin pencacah multifungsi, sumur bor, dan penambahan daya listrik di lokasi bank sampah induk. Fermi Travianto General Manager PLN UIP3B Sulawesi menerangkan kolaborasi ini merupakan bentuk keyakinan PLN bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama oleh karena itu PLN berkomitmen dalam membangun usaha berbasis lingkungan melalui pencegahan sejak dini (Pilar Media, 2025). Maka dari itu, berdasarkan kondisi tersebut timbullah pertanyaan “Bagaimana pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk Mabessa Kab. Bone ditinjau dari skema *Public Social Partnership*?”

Penerapan konsep *Public Social Partnership* dalam pelaksanaan program layanan publik pemerintah telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan & Warsa (2017) dengan judul “*Public Social Private Partership* (PSP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik” Penelitian ini menggunakan teori Leonhard *et al.*, (2007) terdiri atas transparansi dan komitmen, pengawasan pelaksanaan kemitraan, proses negosiasi mutualisme, dan kesetaraan peran dalam kemitraan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan PSP dalam pembangunan infrastruktur publik di pasar PPKS Kab. Sumedang belum terlaksana secara optimal. Transparansi dan koordinasi pengawasan pasar belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah sehingga menghambat proses pembangunan pasar. Serta optimalisasi infrastruktur juga terhambat akibat belum adanya tindakan korektif yang dilakukan oleh aktor dalam mengatasi kendala program.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Zaahirah (2024) dengan judul “*Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak pada *Shelter* Rumah Aman Pattongalloan Kota Makassar” Penelitian ini menggunakan teori *Public Social Partnership* oleh (Mazzei *et al.*, 2018) dengan menggunakan aspek kepemimpinan, keterlibatan pengguna layanan, pengalokasian anggaran, dan formalisasi kemitraan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan PSP di *Shelter* Pattongalloan dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, pengelola *shelter* dan PT Pertamina sudah diterapkan secara optimal. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ainun Maghfira (2025) dengan judul “*Public Social Partnership* dalam Program Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Kota Makassar” Penelitian ini menggunakan teori yang sama (Mazzei, *et al.*, 2018) dengan analisis 7 aspek yaitu kepemimpinan, keterlibatan pengguna layanan, pengalokasian anggaran, formalisasi kemitraan, penguatan hubungan kerja sama, pemecahan silo, dan fleksibilitas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSP belum optimal di mana aspek kepemimpinan, formalisasi kemitraan, penguatan kerjasama, dan pemecahan silo masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, aspek fleksibilitas, keterlibatan pengguna layanan, dan pengalokasian anggaran sudah optimal.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah bukanlah hal baru dan hingga saat ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Kendati demikian, dalam beberapa konteks praktik pengelolaan sampah mulai menunjukkan kontribusi positif dalam upaya mengurangi timbunan sampah, salah satunya melalui program bank sampah. Maka dari itu, penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis proses kemitraan dalam pengelolaan 3R di BSI Mabessa sebagai salah satu faktor keberhasilan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian terdahulu pada umumnya fokus pada peran pemerintah dan sektor swasta, sementara dalam konteks pengelolaan sampah, masyarakat memegang peranan penting sebagai pengelola awal, mengingat volume sampah terbesar salah satunya bersumber dari sampah rumah tangga. Sehingga dirasa perlu penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana penerapan PSP dalam konteks manajemen 3R di bank sampah, untuk memahami bagaimana kemitraan dapat dimanfaatkan dalam pengoptimalan fungsi bank sampah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PUBLIC SOCIAL PARTNERSHIP DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH INDUK MABESSA DI KAB.BONE.”**

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 Konsep *Public Social Partnership* (PSP)

Public social partnership (PSP) hadir dari perkembangan administrasi publik yaitu *New Public Governance* (NPG). NPG berkembang pada awal tahun 2000an dengan mengisyaratkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Konsep ini memungkinkan adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan berbagai aktor merupakan akibat dari terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik yang baik (Setiawan & Warsa, 2018). Osborne (2010) menerangkan bahwa NPG merupakan bentuk respon dari semakin kompleks dan beragamnya bentuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik pada abad ke-21 (Styadi, 2024).

NPG memandang bahwa perlu dilakukan peningkatan dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik, peningkatan ini tidak dijalankan melalui agenifikasi, persaingan dan pilihan. Namun, melalui memperbanyak kerja sama, negosiasi, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan yang relevan, harapannya melalui hal tersebut dapat berkontribusi dalam pengetahuan, ide, dan sumber daya. Sebagaimana, dalam prinsipnya NPG fokus pada proses dan hasil, koordinasi, partisipasi dan produksi bersama (Torfing & Triantafillou, 2013).

NPG merepresentasikan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakatnya secara inklusif tanpa diskriminasi, perubahan ini merupakan bentuk respon dari pemerintah dan masyarakat dalam bertahan dari tantangan global yang terjadi guna tetap menjaga

stabilitas pemerintahan baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan kedaulatan politik. Terdapat 5 konsep kunci dalam paradigma NPG dalam Styadi (2024) diantaranya yaitu:

- 1) Konsep *co-production*, kerja sama antar aktor
- 2) Konsep *hybrid organization*, organisasi Tangguh
- 3) Konsep kompetensi kunci, *entrepreneur*
- 4) Konsep akuntabilitas, konsep relasi dua arah dan;
- 5) Konsep evaluasi operasional.

Dalam perkembangannya, NPG mengasumsikan bahwa partisipasi aktif antara administrator publik, warga negara, dan pihak swasta dalam pembuatan kebijakan dan layanan publik dapat terbentuk bila diberikan kesempatan yang tepat. Maka dari itu, NPG sangat menekankan pada kolaborasi bukan persaingan dalam mengatasi permasalahan kebijakan yang kompleks. NPG mengedepankan negosiasi dan mendorong interaksi antara pemangku kepentingan dan otoritas publik diberbagai tingkatan dalam membangun jaringan, kemitraan dan kontrak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan demokratis melalui interaksi pertukaran dan pengumpulan ide beserta sumber daya publik dan swasta, serta guna memfasilitas wadah pembelajaran bersama dan meningkatkan kepercayaan atas inovasi atau solusi yang akan dijalankan (Torfing & Triantafillou, 2013).

Public Social Partnership (PSP) merupakan salah satu cerminan dari NPG yang mengisyaratkan pemerintahan yang lebih terbuka dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam layanan publik. PSP didefinisikan sebagai bentuk kemitraan dalam rangka peningkatan layanan publik dengan melibatkan kolaborasi antar pelaku dari berbagai sektor yang berperan dalam merancang dan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan (Mazzei et al., 2018). Secara etimologis, kemitraan sendiri berasal dari kata *partnership*, *partner* berarti kawan, sekutu, atau mitra. Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang didasari oleh rasa saling membutuhkan, adapun kesepakatan yang dicapai bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas suatu usaha atau tujuan tertentu agar memperoleh hasil yang memuaskan (Styadi, 2024).

Dalam PSP setidaknya harus terdapat tiga aktor yang masing-masing berperan dalam pembiayaan infrastruktur, pengembangan pelayanan publik dan penyusunan serta analisis ide sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan *public private partnership*, pada PSP proses kolaborasi yang dilaksanakan oleh berbagai aktor sepenuhnya berorientasi sosial tanpa mencari keuntungan apapun. Setiap mitra memahami bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk kontribusinya pada stabilitas dan solidaritas sosial (Setiawan & Warsa, 2018).

1.2.2 Model *Public Social Partnership* (PSP) oleh Mazzei, Calo, Roy, dan Teasdale (2018)

Mazzei, Calo, Roy, dan Teasdale (2018) mengemukakan beberapa prinsip yang digunakan untuk menilai keberhasilan PSP diantaranya sebagai berikut.

1) Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan faktor fundamental dalam menilai keberhasilan PSP, pemimpin memegang peranan penting dalam memastikan suatu program berjalan lancar. Maka dari itu, penting untuk memiliki pemimpin yang tepat baik pada tingkatan manajemen dan pelaksanaan (Mazzei et al., 2018). Dalam konteks kemitraan, pemimpin berperan meningkatkan kepercayaan dalam proses kolaborasi, bukan hanya untuk internal organisasi namun juga eksternal.

Dalam konteks BSI Mabessa, peran pimpinan terlihat dalam pemeliharaan kemitraan dan pelaksanaan operasional BSI Mabessa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. Fungsi manajemen berkaitan dengan proses perencanaan strategi, pengorganisasian dan pengendalian guna memastikan tujuan program dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone sebagai *leading sector* yang memfasilitasi dan membina BSI Mabessa sesuai dengan SK yang ditetapkan. Termasuk menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan *stakeholder* yang dapat mendukung program BSI Mabessa.
- b. Fungsi pelaksanaan berkaitan dengan implementasi strategi maupun rencana yang dijalankan guna mencapai tujuan program. Dalam hal ini, pelaksanaan program bank sampah melibatkan direktur BSI Mabessa untuk memantau proses pelaksanaan program dan mengawasi kinerja masing-masing koordinator bagian dalam manajemen sampah di BSI.

2) Keterlibatan Pengguna Layanan

Perubahan paradigma ini membuka kesempatan bagi masyarakat selaku pengguna layanan untuk turut aktif dalam tingkatan perencanaan dan penyampaian kebijakan dan layanan. Model ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan termasuk dalam keputusan bagaimana layanan akan direncanakan (Mazzei et al., 2018).

Aspek keterlibatan pengguna layanan mengisyaratkan bagaimana masyarakat selaku pengguna layanan terlibat dalam proses manajemen sampah di BSI Mabessa mulai dari tingkat perencanaan, penyampaian kebijakan dan layanan. Hal ini dapat diamati melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkatan.

- a. Keterlibatan dalam perencanaan, dalam hal ini keterlibatan masyarakat selaku pengguna layanan dibutuhkan guna menyusun strategi pengembangan program bank sampah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Keterlibatan dalam pelaksanaan, hal ini dapat dilihat dengan menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di BSI Mabessa khususnya dalam praktik 3R maupun pada program-program edukasi yang dijalankan oleh bank sampah.
- c. Keterlibatan dalam evaluasi berkaitan dengan bagaimana masyarakat berkesempatan dalam memberikan umpan balik atau masukan terkait aktifitas di bank sampah induk.

3) Pengalokasian Anggaran

Anggaran seringkali menjadi tantangan dalam pelaksanaan suatu program, terbatasnya alokasi anggaran biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik dan pada akhirnya menghambat pelaksanaan program yang kolaboratif dan transparan. Adanya keterbatasan ini menyebabkan seringkali pelaksanaan program layanan publik dirancang untuk pelaksanaan jangka pendek padahal, pada konsep PSP strategis membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar dalam jangka panjang (Mazzei et al., 2018). Maka dari itu, penerapan PSP merupakan alternatif dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

. Pengalokasian anggaran seringkali menjadi tantangan dan hambatan dalam program pengelolaan sampah yang efektif. Keterbatasan anggaran menyebabkan terbatasnya pula pengembangan dan pelaksanaan program. Maka dari itu, kolaborasi antara sektor publik dan sektor ketiga membuka kesempatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan anggaran yang cukup untuk mendukung manajemen sampah.

Aspek pengalokasian anggaran merujuk pada bagaimana pengalokasian baik dalam bentuk dana maupun sarana prasarana dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional BSI Mabessa, seperti fasilitas yang tersedia, alokasi dukungan anggaran dari pemerintah, dan dukungan dari mitra. Kemitraan dengan pihak swasta dilakukan oleh pihak BSI Mabessa guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di bank sampah induk. Surya Indah Swalayan bertanggung jawab dalam menyediakan sembako yang menjadi salah satu alternatif penukaran selain uang yang bisa didapatkan masyarakat ketika menukarkan sampah. Serta, PLN UIP3B Sulawesi melalui program tanggung jawab sosial menyediakan mesin pencacah, sumur bor,

dan penambahan daya listrik untuk mendukung kegiatan operasional di BSI Mabessa.

4) Formalisasi Kemitraan

Formalisasi kemitraan merupakan proses menetapkan visi dan misi, prosedur kerjasama, aturan dan rencana komunikasi yang disepakati bersama oleh para aktor. Selain bertujuan memperjelas legalitas kerjasama, formalisasi kemitraan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para aktor, agar mereka merasa memiliki andil dan hak suara dalam proses penetapan tujuan. Dalam hal ini, tiap aktor diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam merancang dan mengembangkan struktur tata kelola yang disepakati oleh seluruh aktor. Bentuk kesepakatan kemudian dituangkan dalam sebuah aturan maupun nota kesepahaman yang mengatur rancangan-rancangan strategis dalam penerapan PSP.

Aspek formalisasi kemitraan digunakan untuk melihat bagaimana hubungan kerja sama antar aktor memiliki dasar formal atau kesepakatan yang jelas dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk menetapkan langkah-langkah dan standar prosedur yang akan dilakukan dalam manajemen bank sampah. Adanya kesepakatan ini akan menunjukkan batasan-batasan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga diharapkan dapat mendukung pengelolaan BSI Mabessa yang optimal dan berkelanjutan.

5) Penguatan Hubungan Kerja Sama

Penguatan hubungan kerja sama atau kolaborasi dalam pelaksanaan suatu program merupakan hal yang penting. Dalam konteks PSP, penguatan mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kolaboratif yang baik antar aktor baik secara personal maupun antarorganisasi. Penguatan ini membantu para aktor untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya berkontribusi dalam pengelolaan konflik, peningkatan layanan, dan kesuksesan program yang dilaksanakan (Mazzei et al., 2018).

Aspek penguatan hubungan kerja sama digunakan untuk memahami hubungan dan komitmen antar aktor baik pemerintah, swasta dan masyarakat/ nasabah bank sampah. Hal ini akan diamati dengan melihat proses dan interaksi masing-masing aktor diantaranya:

- a. Komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan bagaimana proses pertukaran informasi dan penyesuaian aktifitas dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis 3R di BSI Mabessa berjalan optimal.

- b. Persamaan nilai, hal ini berkaitan dengan nilai maupun keyakinan yang dibawa oleh masing-masing aktor, sehingga dapat memperkuat komitmen aktor dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan tujuan pelaksanaan program.

6) Pemecahan Silo

Silo pada organisasi merupakan gambaran dari adanya sebuah sub sistem atau unit yang bekerja seperti di “pulau” tersendiri. Unit ini cenderung tertutup, terdiferensiasi, dan tidak terhubung dengan unit organisasi lainnya. Dalam hal ini, batasan yang terjadi bukan lagi hal wajar, tetapi merujuk pada kondisi unit dalam organisasi yang betul-betul kaku dan menghambat proses komunikasi dan penyampaian informasi antar unit (Gregory, 2006) dalam (Vantaggiato et al., 2020).

Pada proses kemitraan, kondisi silo menandakan bahwa masih adanya kesenjangan kekuasaan antara sektor publik sebagai aktor utama atau pemimpin kerjasama dengan organisasi pihak ketiga. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesetaraan hubungan antar aktor (Mazzei et al., 2018). Dalam praktik manajemen sampah di BSI Mabessa, pemecahan silo merupakan hal krusial untuk menghilangkan batasan-batasan antar aktor. Sehingga kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan erat serta, masing-masing aktor dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dengan tetap selaras pada tujuan bersama.

Pemecahan silo akan menelaah bagaimana batas-batas antar aktor berhasil dihilangkan. Hal ini dapat diamati dengan melihat keterbukaan dan pertukaran informasi serta kesetaraan hubungan dan sinergi antar aktor. Dalam konteks manajemen BSI Mabessa, aspek ini akan terlihat ketika pihak swasta sebagai pendukung operasional dan bank sampah unit serta masyarakat sebagai pihak pengepul maupun nasabah bekerja sama dan berorientasi kepada BSI Mabessa sebagai pelaksana utama.

7) Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan aspek penting dalam menciptakan kemitraan yang strategis. Kemitraan yang fleksibel memberikan ruang bagi para aktor untuk melakukan eksperimen atau mencoba pendekatan dan mengusulkan ide-ide baru, sehingga memungkinkan munculnya inovasi atau ide untuk pengembangan layanan publik yang diselenggarakan. Fleksibilitas ini mendorong terciptanya kemitraan yang terus berkembang dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi di lapangan.

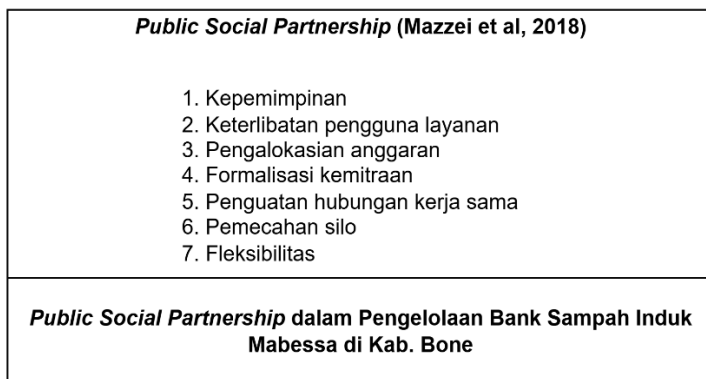
Fleksibilitas dalam konteks BSI Mabessa mengacu pada kemampuan para aktor dalam merespon dan menyesuaikan strategi

serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang terjadi dilapangan. Termasuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan optimal. Fleksibilitas pada program BSI Mabessa dapat tercermin sebagai berikut.

- a. Aspek strategi, hal ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan masing-masing aktor dalam mengeksplorasi ide-ide dan mendukung inovasi dalam rangka peningkatan produktivitas bank sampah.
- b. Pemanfaatan sumber daya, hal ini melihat bagaimana BSI Mabessa mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada agar aktifitas di bank sampah tetap efektif.

Pada penelitian ini, guna menganalisis pengelolaan sampah di BSI Mabessa maka peneliti menggunakan teori *Public Social Partnership* (PSP) dengan mengacu pada tujuh aspek di atas dalam memahami dan menjelaskan bagaimana bentuk kemitraan yang tercipta dalam praktik pengelolaan BSI Mabessa untuk mengelola sampah berbasis prinsip 3R di Kab. Bone. Teori ini dianggap paling relevan terhadap konteks kemitraan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan BSI Mabessa Kab. Bone. Selain itu, aspek ini juga memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan suatu program, begitu banyak indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Maka dari itu, pada penelitian ini akan melihat bagaimana setiap aspek berkontribusi dalam kemitraan pengelolaan sampah BSI Mabessa Kab. Bone. Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini:

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan peneliti dari (Mazzei et al, 2018)

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan *Public Social Partnership* dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Mabessa Kab. Bone. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kajian dan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses kemitraan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R.

2. Manfaat Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman evaluasi bagi pihak terkait, dalam membuat kebijakan dan menjalin kerjasama untuk peningkatan kualitas pengelolaan Bank Sampah Induk Mabessa. Disamping itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman pembaca untuk bersama-sama bersinergi dalam menyelesaikan upaya penanggulangan sampah.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan proses mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah fenomena dari sudut pandang partisipan baik individu atau kelompok dalam menyikapi masalah sosial atau kemanusiaan tertentu (Creswell & Creswell, 2018). Kemudian peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena berbasis data yang telah diteliti secara akurat dan sistematis (Sahir, 2021). Punaji Setyosari mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan atau peristiwa baik dijelaskan dalam bentuk angka maupun kata-kata dan mengkaji keterkaitannya dengan variabel-variabel yang ada (Samsu, 2017).

Pemilihan penelitian kualitatif deskriptif bertujuan agar penulis dapat memahami dan mendalami penerapan PSP oleh para aktor yang bersinergi dalam pengelolaan Bank Sampah Induk Mabessa Kab. Bone. Sehingga penulis dapat menggambarkan secara detail situasi dan bentuk kemitraan yang terjadi dengan berlandaskan teori *Public Social Partnership* oleh Mazzei, Calo, Roy, dan Teasdale (2018).

2.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi terkait bagaimana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Widodo et al., 2023). Peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus yaitu sebuah bentuk penelitian mendalam terkait individu, kelompok atau organisasi maupun sebuah program dalam rentan waktu tertentu dengan menempatkan obyek yang akan diteliti sebagai 'kasus' (Abdussamad, 2021) (Samsu, 2017). Peneliti memilih studi kasus untuk memahami secara mendalam dan mendapatkan gambaran holistik terkait penerapan PSP dalam praktik 3R di BSI Mabessa Kab. Bone. Penelitian ini akan menggali fenomena kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Penentuan Informan

Penelitian ini mengambil informan dari pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi dan data atau yang paling memahami fenomena yang diangkat dalam penelitian. Informan yang dipilih merupakan aktor-aktor yang saling bekerjasama dan terlibat dalam

pengelolaan Bank Sampah Induk Mabessa Kab. Bone diantaranya yaitu:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone
- b. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan LB3 DLH Kab. Bone
- c. Direktur Bank Sampah Induk Mabessa
- d. Pengelola Bank Sampah Induk Mabessa
- e. Surya Indah Swalayan
- f. PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIP3B) Sulawesi
- g. Pengelola Bank Sampah Unit
- h. Masyarakat/ nasabah Bank Sampah Induk Mabessa

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi
Metode observasi adalah proses mengamati dan mencatat secara sistematis yang digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dalam lingkup responden yang tidak terlalu besar (Rahim et al., 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif yaitu peneliti tidak terlibat langsung dan hanya akan mengamati situasi dan kondisi bank sampah serta bagaimana para aktor berinteraksi dalam proses pengelolaan sampah.
- b. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam hal-hal dari responden, Arikunto (1993) dalam (Samsu, 2017) mendefinisikan wawancara sebagai proses interaksi antara pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi. Wawancara digunakan untuk memahami secara mendalam data dari hasil observasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu tipe wawancara yang lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, peneliti turut mempertanyakan ide dan pendapat terwawancara (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam dari para aktor yang terlibat untuk mengetahui dan memahami persepektif aktor dalam proses kemitraan pengelolaan sampah di bank sampah induk.
- c. Telaah Dokumen
Metode telaah dokumen digunakan untuk mendukung data yang diperoleh yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa tulisan, gambar, karya, peraturan, biografi dan kebijakan

(Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini dokumen berupa peraturan dan nota kesepahaman yang terkait dengan penerapan PSP dalam pengelolaan bank sampah. Adanya dokumen berguna untuk mendukung kredibilitas hasil observasi dan wawancara yang dilakukan.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian mencari dan menyusun data yang diperoleh di lapangan baik saat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dikategorikan dan mengambil bagian yang penting agar memudahkan dalam menarik kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2013). Terdapat beberapa proses dalam analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014):

- a. *Data condensation* (kondensasi data)
Kondensasi data merupakan proses memilih, menyederhanakan dan mentransformasi data yang diperoleh selama penelitian. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian, data yang diperoleh kemudian dianalisis sedemikian rupa untuk menarik kesimpulan akhir.
- b. *Data display* (penyajian data)
Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi serta menentukan rencana tindak lanjut. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk naratif teks panjang disertai dengan gambar dan grafik.
- c. *Drawing and verifying conclusions* (penarikan dan verifikasi kesimpulan)
Tahapan ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan valid dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan sebelumnya. Biasanya sejak awal peneliti telah memiliki kesimpulan sementara yang ditarik berdasarkan pola dan hubungan yang ditemui. Kemudian dikuatkan atau mungkin berubah seiring dengan data yang ditemukan di lapangan.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas merujuk pada proses memeriksa akurasi dan kredibilitas hasil penelitian baik dari persepektif peneliti, partisipan dan pembaca hasil penelitian dengan melalui prosedur tertentu (Creswell & Cresswell, 2018). Pada penelitian ini untuk memverifikasi keabsahan data dilakukan uji triangulasi sumber data. Triangulasi sumber merupakan proses menguji keabsahan data dengan mengecek data yang dihasilkan ke beberapa sumber. Peneliti memanfaatkan triangulasi untuk uji validitas data dari para aktor termasuk dari sumber telaah dokumen.

Reliabilitas data pada penelitian kualitatif merujuk pada konsistensi atau stabilitas data, dikatakan reliabel jika informasi atau data yang didapatkan dari populasi konsisten meskipun penelitian dilakukan oleh orang dan di waktu yang berbeda. Pada penelitian ini akan dilakukan pencatatan dan dokumentasi setiap langkah-langkah prosedur penelitian sehingga dapat dijadikan acuan oleh peneliti lainnya Yin (2009) dalam (Creswell & Creswell, 2018).